BAB III

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA

3.1. Sejarah Singkat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat diresmikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12/1983, terletak di Jalan Surapati No. 71 Bandung - Jawa Barat.

Sebelum berstatus Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Instansi Pemerintah ini telah mengalami banyak perubahan baik nama, pengelolaan maupun dalam bidang usahanya. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas, akan penulis kemukakan tentang sejarah singkatnya.

Pada masa penjajahan Belanda ada beberapa lembaga yang menyelenggarakan pembinaan pertanian di Jawa Barat diantaranya ialah *Provinciale Landbouw Voorlichtings Dienst* (LVD) yang dikepalai oleh *Landbouw Inspecteur* . Diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1912. LVD berfungsi memberikan pembinaan terhadap para petani untuk mempertinggi produksi sedangkan alih teknologi diberikan dalam batas tertentu berdasarkan pertimbangan politis. LVD sendiri terbagi atas tanaman rakyat (padi, palawija, sayur, buah-buahan) dan tanaman keras (kopi, karet, kapuk, kina dan teh). Secara organik, LVD berada dibawah *Department van Lanbouw Nijverheid en Handel* (Departemen Pertanian Perindustrian dan Perdagangan) di Batavia. Wilayah kerjanya terbagi atas 5, tingkat propinsi dan karesidenan dijabat oleh orang Belanda sedangkan tingkat kabupaten,

kawedanaan dan kecamatan umumnya dijabat pribumi. Kelembagaan khusus lainnya yaitu *Zaad Hoeve* (Balai Benih Padi) didirikan tahun 1921 dan berkedudukan di Cihea, Cianjur dan dikelola oleh LVD. Untuk mendukung pelaksanaan, maka didirikan 3 Lembaga Pendidikan Pertanian yaitu *Cultuur School* (CS) di Sukabumi, *Midlebaare Landbouw School* (MLS) di Bogor dan *Landbouw Bedrijf Scool* (LBS) di Sumedang.

Tahun 1942 tentara sekutu dikalahkan oleh pasukan Jepang dalam Perang Dunia II, LVD (termasuk Balai Benih Padi) yang dikelola oleh Belanda diambil alih *Norinka* yang bernaung di bawah pemerintahan Jepang. Kebijaksanaan, program dan sistemnya tidak jauh berbeda dengan Belanda hanya tujuannya lebih diperluas dengan sasaran utama memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk mensuplai keperluan perang bagi tentara Jepang. Sedangkan di bidang pendidikan perubahan ditandai dengan bergantinya nama *Landbouw Bedrijf Scholl* (LBS) menjadi sekolah Pertanian Pertama. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945 didirikan Jawatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan lembaga di bawah Departemen Kemakmuran. Kebijaksanaan maupun programnya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang menyangkut kemakmuran rakyat. Balai Benih Padi Cihea dilanjutkan oleh Jawatan Pertanian Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea). Sedangkan Sekolah Pertanian Pertama Tanjungsari, diubah menjadi sekolah Pendidikan Mantri Pertanian .

Pada tahun 1950 lahir Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan Undang-undang No. 11/1950. Sebagai tindak lanjut daru UU tersebut, terbit Peraturan Pemerintah No. 29/1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan peraturan tadi, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat menerbitkan SK. Dewan Pemerintah Daerah Sementara No. 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952 yang membentuk 3 Jawatan Pertanian yaitu Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan Darat. SK tersebut juga menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Jawatan. Selanjutnya dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat di Daerah Tingkat II dengan maksud penyerahan urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada Daerah Tingkat II/ kotapraja di seluruh Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/PD-DPRD-GR/1961.

Akhirnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 197/A.V/18/SK/1975 tentang Perubahan Sebutan Jawatan menjadi Dinas, maka Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Tahun 1983, terbit SK. Menteri Pertanian No. 2110/706/Kpts/1983 tanggal 27 September 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian - Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, sehingga nama pun disesuaikan menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

3.2. Visi, Misi dan Strategi Dinas Pertanian

Visi Jawa Barat

" Jawa Barat Dengan Iman dan Taqwa Sebagai Propinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010 "

Visi dan Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat

Visi

Sebagai pengatur handal dalam mewujudkan agribisnis tanaman pangan termaju di Indonesia tahun 2005.

Misi

a. Mewujudkan SDM Pertanian Tanaman Pangan Yang Maju dan Mandiri

b. Mengembangkan Pengaturan Agribisnis Tanaman Pangan Yang Berdaya Saing Tinggi, Ramah Lingkungan dan Berkerakyatan.

c. Meningkatkan SDA dan Sumberdaya Buatan Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Agribisnis Tanaman Pangan

3.3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi Diperta Jabar ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan UU No. 22/1999 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat. Struktur Organisasi terlampir.

Secara garis besar Struktur Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

I. Kepala Dinas dan wakil Kepala Dinas

II. Bagian Tata Usaha : Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum

III. Sub Dinas Bina Program : Seksi Data dan Informasi, Seksi Penyusunan Program, Seksi Evaluasi dan Pelaporan

IV. Sub Dinas Sumber Daya: Seksi Lahan dan Tata Guna Air, Seksi Sarana Produksi dan Mekanisasi, Seksi Sumber Daya Manusia Pertanian

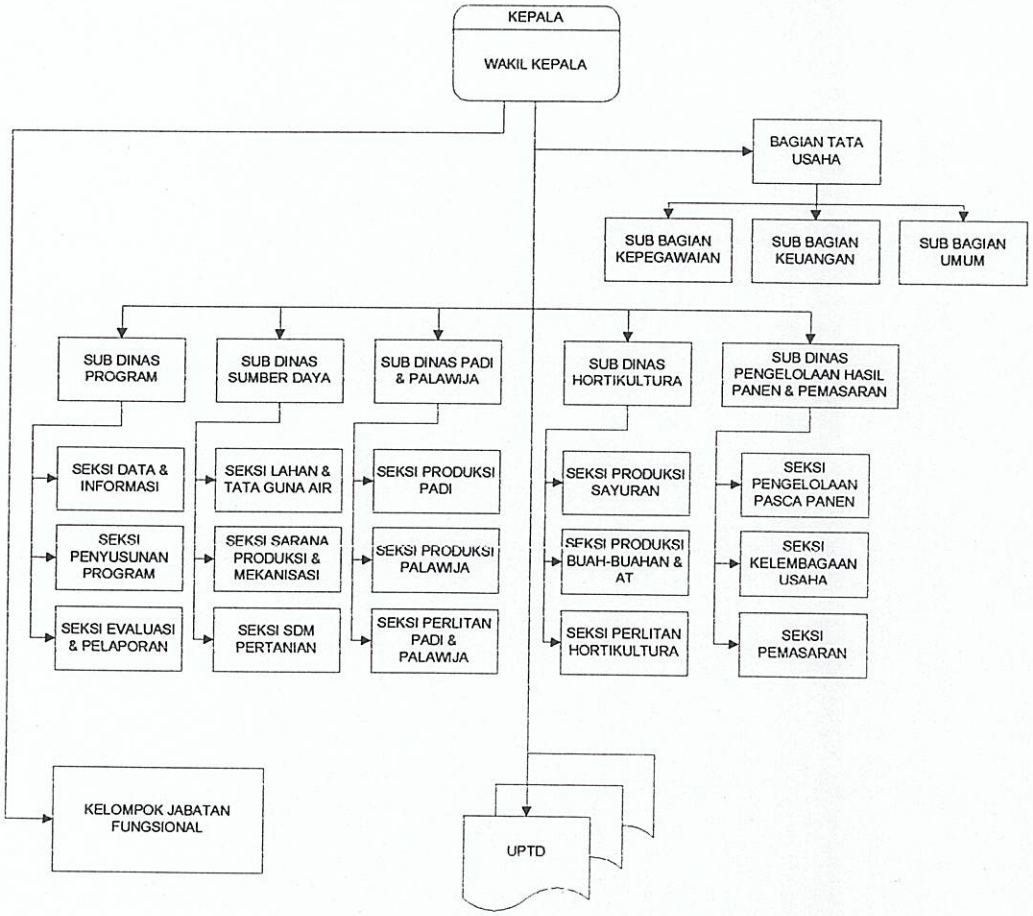
V. Sub Dinas Padi dan Palawija : Seksi Produksi Padi, Seksi Produksi Palawija, Seksi Perlintan Padi dan Palawija

VI. Sub Dinas Hortikultura: Seksi Produksi Sayuran, Seksi Produksi Buah dan Aneka Tanaman, Seksi Perlintan Hortikultura

VII. Sub Dinas Pengelolaan Hasil dan Pemasaran : Seksi Pengelolaan Pasca Panen , Seksi Kelembagaan Usaha, Seksi Pemasaran.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

PROPINSI JAWA BARAT



3.1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat

Sumber :

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 15 Tahun 2000 Tgl. 12 Desember 2000

Tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat

3.4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Sub Dinas Hortikultura

Mengetahui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2001 Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Sub Dinas Hortikultura, adalah :

a. Sub Dinas Hortikultura mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan produksi sayuran, buah – buahan dan aneka tanaman serta perlindungan tanaman Hortikultura.

b. Untukmelaksanakan tugas pokok, Sub Dinas Hortikultura mempunyai fungsi :

   1. Perumusan bahan kebijakan operasional penyusunan pedoman pengembangan tanaman Hortikultura.
   2. Perumusan bahan standarisasi dan fasilitas pengembangan produksi tanaman Hortikultura.
   3. Perumusan bahan perlindungan tanaman Hortikultura.

c. Rincian Tugas Sub Dinas Hortikultura, adalah :

   1. Menyelenggarakan perumusan rencana kerja Sub Dinas Hortikultura.
   2. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi pengembangan produksi sayuran,buah – buahan, aneka tanaman dan supervisi perlindungan tanaman Hortikultura.

3. Menyelenggarakan perumusan bahan koordinasi pengembangan produksi sayuran, buah – buahan dan aneka tanaman serta perlindungan tanaman Hortikultura.
4. Menyelenggarakan perumusan bahan pembinaan teknis operasional UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan.
5. Mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Dinas Hortikultura.

d. Sub Dinas Hortikultura membawahkan :

1. Seksi Produksi Sayuran, mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan produksi sayuran.

   Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Produksi Sayuran mempunyai tugas :

   a. Penyusunan bahan kebijakan operasional penyusunan pedoman pengembangan produksi sayuran.
   b. Penyusunan bahan standarisasi dan fasilitas pengembangan produksi sayuran

   Rincian Tugas Seksi Produksi Sayuran, adalah :

   a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi Sayuran.
   b. Melaksanakan penyusunan datan pengembangan produksi sayuran.
   c. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standarisasi, supervisi serta fasilitas pengembangan kawasan dan sentra – sentra produksi sayuran.

d. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standarisasi mutu dan fasilitas pengembangan system pembenihan sayuran.
e. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitas pengembangan teknologi, produksi, pembenihan serta pola produksi dan pola tanam sayur.
f. Melaksanakan penyusunan bahan standarisasi operasional prosedur di bidang pengembangan teknologi dan produksi sayuran.
g. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Produksi Sayuran.

2. Seksi Produksi Buah – buahan dan Aneka Tanaman mempunyai tugas pokok nerumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan teknologi dan produksi buah – buahan dan aneka tanaman.

   Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Produksi Buah – buahan dan Aneka Tanaman mempunyai fungsi :

   a. Penyusunana bahan kebijakan operasional pedoman pengembangan produksi buah – buahan dan aneka tanaman.
   b. Penusunan bahan standarisasi dan fasilitas pengembangan produksi buah – buahan dan aneka tanaman.

   Rincian Tugas Seksi Produksi Buah – buahan dan Aneka Tanaman:

   a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi Buah – buahan dan Aneka Tanaman.

b. Melaksanakan penyusunan data pengembangan produksi buah– buahan dan aneka tanaman.

c. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standarisasi mutu, supervisi serta fasilitasi pengembangan kawasan dan fasilitasi pengembangan system perbenihan di sentra – sentra produksi buah – buahan dan aneka tanaman.

d. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur pengembangan produksi buah – buahan dan aneka tanaman.

e. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi Produksi Buah – buahan dan Aneka Tanaman.

3. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan operasional di bidang perlindungan tanamana dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan pedoman pengembangan perlindungan tanaman hortikultura.

b. Perumusan bahan standarisasi dan fasilitas perlindungan tanaman hortikultura.

c. Perumusan bahan pengembangan perlindungan tanaman hortikultura.

Rincian Tugas Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura, adalah :

a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja Seksi

Perlindungan Tanaman Hortikultura.

b. Melaksanakan penyusunan data perkembangan serangan organisme pengganggu tanaman hortikultura.

c. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman hortikultura.

d. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman standar operasional prosedur, standarisasi mutu, supervisi, fasilitasi pengendalian eksplosi organisme pengganggu tanaman hortikultura serta peredaran penggunaan dan penyimpanan serta pemusnahan pestisida.

e. Melaksanakan penyusunan bahan pengawasan residu pestisida dan perlindungan tanaman hortikultura.

f. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura.

3.5. Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Sub Dinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran

Mengetahui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2001 Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Sub Dinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran :

a. Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan oprasional di bidang pengelolaan hasil panen dan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanan dimaksud pada ayat (a) pasal ini, Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran mempunyai fungsi :

   1. Perumusan bahan kebijakan oprasional pedoman hasil panen dan pemasaran produksi pertanian tanaman pangan.
   2. Perumusan bahan standarisasi dan fasilitasi penanganan pasca panen dan hasil penen serta pemasaran produksi pertanian tanaman pangan.
   3. Perumusan bahan pengembangan kelembagaan usaha tani dan pemasaran produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

c. Rincian Tugas Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran :

   1. Menyelenggarakan perumusan rencana kerja Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran.
   2. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, penyusunan pedoman, standarisasi dan supervisi penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan.
   3. Menyelenggarakan perumusan bahan sertifikasi produksi atau hasil pertanian tanaman pangan.
   4. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi pengembangan kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan.

5. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi pengembangan usaha jasa pertanian tanaman pangan.
6. Menyelenggarakan perumusan bahan koordinasi dan mediasi kemitraan antar pelaku usaha pertanian tanaman pangan.
7. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian tanaman pangan.
8. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman dan supervisi pemasaran hasil pertanian tanaman pangan.
9. Menyelenggarakan perumusan bahan koordinasi pengelolaan hasil panen dan pemasaran.
10. Menyelenggarakan perumusan bahan pembinaan teknis oprasional UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan.
11. Mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Dinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran.

d. Sub Dinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran, membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Pasca Panen, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan oprasional di bidang pengelolaan pasca panen produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

   Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pengelolaan Pasca Panen mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan pedoman, standarisasi, supervisi dan fasilitasi pengelolaan produksi pertanian tanaman pangan pasca panen.
b. Penyusunan bahan penanganan produksi pertanian tanaman pangan pasca panen.

Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Pasca Panen :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Pasca Panen.
b. Melaksanakan penyusunan data produksi pertanian tanaman pangan pasca panen.
c. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standarisasi, supervisi dan fasilitasi pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan pasca panen.
d. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, unit pengolahan hasil pertanian tanaman pangan pasca penen.
e. Melaksanakan penyusunan bahan standarisasi mutu hasil dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan pasca panen.
f. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan fasilitasi pengembangan penganekaragaman produksi hasil olahan.
g. Melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi produk atau hasil pertanian tanaman pangan.

h. Melaksanakan penyusunan bahan standart operasional prosedur penanganan produksi komoditas pertanian tanaman pangan pasca panen.

i. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan pasca panen.

j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengelolaan Pasca Panen.

2. Seksi Kelembagaan Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kelembagaan Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan pedoman, standarisasi, supervisi dan fasilitasi pengelolaan kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan.

b. Penyusunan bahan pengembangan kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan.

Rincian tugas Seksi Kelembagaan Usaha :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Usaha.

b. Melaksanakan penyusunan data kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan.

c. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standarisasi, supervisi dan fasilitasi pengembangan manajemen usaha pertanian tanaman pangan.

d. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, pengembangan pola kerja sama atau kemitraan antara petani dengan swasta, koperasi dan badan usaha lainnya.

e. Melaksanakan penyusunan pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitsi pengembangan kawasan wilayah usaha pertanian tanaman pangan.

f. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan investasi dan jaringan usaha pertanian tanaman pangan.

g. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan usaha jasa pertanian tanaman pangan.

h. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan.

i. Melaksanakan penyusunan bahan standart operasional prosedur pengembangan usaha pertanian tanaman pangan.

j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan.

k. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan denga tugas Seksi Kelembagaan Usaha.

3. Seksi Pemasaran, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional dibidang pengembangan pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan.

   Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemasaran mempunyai funsi :

   a. Penyusunan bahan pedoman, stadarisasi, supervisi dan fasilitasi penyelenggaraan pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan.
   b. Penyusunan bahan pengembangan kelembagaan pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan.

   Rincian tugas Seksi Pemasaran :

   a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemasaran.
   b. Melaksanakan penyusunan data kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan.
   c. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, fasilitasi dan supervisi pengembangan sistem pemasaran dan pola tata niaga komoditas pertanian tanaman pangan.
   d. Melaksanakan penyusuna bahan pola permintaan, penawaran, prospek dan perluasan segmen pasar komoditas pertanian tanaman pangan.
   e. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan media promosi pemasaran hasil pertanian tanaman pangan.

f. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan.

g. Melakasanakan pembinaan dan pengendaliaan pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan.

h. Melaksanakan penyusunan bahan standart operasional prosedur pelayanan dan pengembangan sistem pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan.

i. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan usaha pertanian tanaman pangan.

j. Melaksanakan penyusunan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan denga tugas seksi pemasaran.

3.6. Kegiatan yang dilakukan selama Kerja Praktek

a. Menginput data yang di peroleh dari laporan seperti pelatihan – pelatihan, hasil - hasil rapat, hasil - hasil kunjungan baik ke daerah – daerah maupun pusat, ke komputer.

b. Menghitung rerata data yang telah di inputkan untuk mengetahui turun naiknya harga sayuran dan hortikultura dari data yang telah diserahkan oleh kabupaten – kabupaten dan kota - kota di seluruh Propinsi Jawa Barat seperti data harga sayuran di pasar – pasar di seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat,dan lain - lain.

Rumus Perhitungan rerata :

$$\text{Rerata harga per bulan} = \frac{\sum (\text{Harga tiap hari})}{\text{Jumlah hari tiap bulan}}$$

$$\text{Rerata harga per tahun} = \frac{\sum \text{Harga tiap bulan}}{\text{Jumlah bulan}}$$

c. Membuat laporan monitoring harga sayuran dan hortikultura, dan mendata kabupaten mana yang belum mengumpulkan data.

d. Mambuat laporan Pelayanan Informasi Pasar yang kemudian disiarkan di RRI dan TVRI Bandung

e. Membuat laporan setiap kali ada pelatihan, Temu Usaha Tani, dan kunjungan Dinas ke daerah dan luar negeri.

f. Mengadakan kunjungan ke Balai Penelitian Benih Kentang (BPBK) Pangalengan untuk menghadiri pembukaan pelatihan penangkar benih kentang dan melihat – lihat lokasi.

g. Membantu bapak dan ibu pegawai sub dinas Hortikultura dan sub dinas Pengelolaan Hasil dan Pemasaran yang membutuhkan bantuan.

h. Pembuatan Program " *Sistem Informasi Rerata Harga Pasar Per Tahun Produk Sayuran dan Buah – buahan* " di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat.

Untuk lebih jelasnya program yang penulis buat bisa dilihat pada Bab IV. Tentang pembahasan Program " *Sistem Informasi Rerata Harga Pasar Per Tahun Produk Sayuran dan Buah – buahan* "

3.7. Masalah yang dihadapi selama Kerja Praktek

Masalah yang di hadapi selama kerja praktek adalah :

a. Karena antara satu komputer dengan komputer lain yang terdapat di Dinas Pertanian tidak saling terhubung (tidak jaringan), ini menyebabkan kesulitan bagi pegawai untuk dapat mengambil data/file yang terdapat pada komputer lain, sehingga untuk mengambil data tersebut harus menunggu komputer yang digunakan sedang kosong atau harus mengkopi file yang dibutuhkan antar disket.

b. Dalam pemrosesan data selama ini masih menggunakan sistem secara manual yaitu menggunakan Excel.

3.8. Usulan pemecahan masalah selama Kerja Praktek

Usulan yang penulis berikan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat adalah sebagai berikut :

a. Dibangunnya sistem jaringan antar komputer di setiap sub dinas, dan jaringan antar sub dinas khususnya sub dinas program sebagai pengolah semua data, sehingga memudahkan dalam mengambil data dan kedepanya bisa diinformasikan melalui internet, radio, televisi.

b. Memberikan pendidikan atau pelatihan kepada Pegawai tentang komputer.

c. Karena itulah penulis merancang dan membuat suatu program aplikasi yang penulis beri judul "**Sistem Informasi Rerata Harga Pasar Per Tahun Produk Sayuran Dan Buah – Buahan Di Dinas Pertanian**

Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat". Dalam merancang Sistem Informasi tersebut kami memerlukan beberapa data antara lain yaitu :

1. Daftar harga pasar produk sayuran dan buah – buahan rerata perhari, rerata perminggu, rerata perbulan, dan rerata per tahun. Yang nantinya akan dijadikan Laporan Tahunan Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat.
2. Rumus mencari rerata perhari, perminggu, perbulan dan pertahun yang kami dapatkan dari Bapak Ibu pegawai Sub Dinas PHPP (Pengolahan Hasil Panen dan Pemasaran)
3. Daftar nama sayuran dalam bahasa Indonesia, Latin dan Inggris serta nama Familinya.

d. Kreteria perangkat lunak dan perangkat keras minimal yang dapat mendukung berjalannya program dengan baik :

Perangkat Lunak :

1. Sistem Operasi Windows 98
2. Microsoft Visual Basic 6.0
3. Adobe Photoshop 7

Perangakat Keras :

1. Processor P-III dan yang setara (AMD Duron)
2. Memori 128 MB
3. Hardisk 10 Gb
4. VGA card 32 MB
5. Monitor
6. Keyboard dan Mouse